



Sistem Pendidikan di Negara-Negara Eropa (Inggris, Prancis, Jerman dan Belanda)

Anggun Irma¹, Mordiani Damanik², Tsalis Yaumil Fadilah³

¹STAI UISU Pematangsiantar, anggunirma12@gmail.com

²STAI UISU Pematangsiantar, damanikmordiani3@gmail.com

³STAI UISU Pematangsiantar, fadillah2975@gmail.com

Article History		
Received: 26 November 2023	Revised: 26 November 2023	Accepted: 29 November 2023

ABSTRAK

Penelitian ini menjelaskan tentang sistem pendidikan di negara-negara eropa (Inggris, Prancis, Jerman, dan Belanda). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sistem pendidikan di Inggris, Prancis, Jerman, dan Belanda. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian kepustakaan. Hasil dari penelitian ini, yaitu: (1) Struktur dasar sistem pendidikan di Inggris, yaitu: pendidikan pra-primer usia 3-4 tahun, pendidikan primer usia 4-11 tahun, pendidikan sekunder usia 11-16 tahun, pendidikan lanjutan usia 16-18 tahun, dan pendidikan tinggi usia di atas 18 tahun; (2) Secara umum pendidikan di Prancis berlangsung secara sentralistik. Penyelenggaraan pendidikan terdiri dari jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Semua anak di Prancis dikenakan wajib belajar sampai dengan umur 16 tahun. Sekolah di Prancis dimulai dari tingkat TK sebagai tingkat pra-sekolah. Anak yang sudah berumur 2 tahun sudah boleh masuk TK, walaupun pada umumnya anak-anak masuk TK berumur 3-4 tahun; (3) Pendidikan di Jerman dipengaruhi oleh dua lembaga besar, yaitu negara dan agama (Gereja). Pendidikan di Jerman dimulai dari tahap prasekolah disebut Kindergarten (TK) dimulai dari umur 3-6 tahun. Pendidikan dasar pada usia 7-10 tahun. Di Jerman wajib belajar 13 tahun. Program wajib belajar di Jerman, di implementasikan dengan sangat terstruktur dan perencanaan yang matang; (4) Kewajiban belajar di Belanda ditetapkan dalam Undang-undang kewajiban belajar. Tahun 1900 kewajiban belajar itu 6 tahun lamanya, tetapi pada tahun 1928 jangka wajib belajar itu menjadi 7 tahun. Semenjak tahun 1950 lamanya wajib belajar itu ditingkatkan menjadi 8 tahun dan sejak tahun 1969 dijadikan 9 tahun yaitu sampai pada tingkat sekolah menengah.

Kata Kunci: Sistem pendidikan di negara eropa, Sistem pendidikan di negara Inggris, Sistem pendidikan di negara Prancis.

ABSTRACT

This research explains the education system in European countries (England, France, Germany and the Netherlands). This research aims to find out how the education systems are in England, France, Germany and the Netherlands. The research method used is library research. The results of this research are: (1) The basic structure of the education system in England, namely: pre-primary education aged 3-4 years, primary education aged 4-11 years, secondary education aged 11-16 years, further education aged 16-18 years, and higher education aged over 18 years; (2) In general, education in France takes place in a centralized manner. The provision of education consists of basic education, secondary education and higher education. All children in France are subject to compulsory education until the age of 16. Schools in France start from kindergarten level as a pre-school level. Children who are 2 years old can already enter kindergarten, even though generally children enter kindergarten aged 3-4 years; (3) Education in Germany is influenced by two large institutions, namely the state and religion (Church). Education in Germany starts from a preventive stage called Kindergarten (TK) starting from the age of 3-6 years. Basic education at the age of 7-10 years. In Germany it is mandatory to study for 13 years. The compulsory education program in Germany is implemented with a very structured and careful planning; (4) The obligation to study in the Netherlands is stipulated in the Law on the obligation to study. In 1900 the compulsory education period was 6 years, but in 1928 the compulsory education period became 7 years. Since 1950, the length of compulsory education has been increased to 8 years and since 1969 it has been made to 9 years, namely up to secondary school level.

Keywords: Education system in European countries, Education system in the United Kingdom, Education system in France.



A. PENDAHULUAN

Setiap bangsa mempunyai sistem pendidikan yang disesuaikan dengan keadaan masing-masing dan tidak mempunyai kemampuan seperti bangsa lain. Ada beberapa negara yang telah mencapai kemajuan yang signifikan, namun ada juga banyak negara yang masih berkembang dan kemajuannya lambat. Sejarah bangsa merupakan alat yang ampuh untuk memahami sistem pendidikan, yang tercermin dalam kebijakan bangsa dan politik pendidikan.

Perbandingan pendidikan telah ada sejak manusia mulai memperhatikan sistem kehidupan orang lain di masyarakat pada masa lampau, dimana mereka telah melakukan komunikasi sosial dan saling memperhatikan satu sama lain. Hal ini yang menjadi dasar tumbuhnya kebudayaan dan peradaban manusia. Sikap saling memperhatikan kehidupan orang lain, kemudian berkembang menjadi sikap memperhatikan terhadap sistem kehidupan masyarakat di luar dirinya. Sikap semacam inilah yang mendorong manusia berpandangan positif terhadap usaha menransfer nilai-nilai yang dianggap baik dan cocok yang terdapat dalam sistem kehidupan orang lain atau masyarakat lain. Perbandingan pendidikan mengarahkan sasaran studinya kepada masalah teori dan praktek pendidikan yang sekarang dengan memperhatikan berbagai faktor latar belakang yang mempengaruhi misalnya faktor politik, sosial budaya, ekonomi, dan sebagainya termasuk sejarah pendidikan masyarakat yang bersangkutan.

Pendidikan merupakan lembaga sosial yang diakui sebagai alat strategis yang amat penting yang turut menentukan upaya-upaya pembangunan suatu bangsa. Pendidikan sebagai lembaga kemanusiaan yang bersifat universal, dimiliki oleh setiap masyarakat bangsa di dunia. Hanya saja terdapat perbedaan-perbedaan dari segi cara atau metode pendekatan yang digunakan dalam operasionalisasinya. Beranjak dari penjelasan tersebut maka kita bisa melihat lebih jauh tentang bagaimana sistem pendidikan di negara Eropa yang meliputi Inggris, Prancis, Jerman dan Belanda.

B. METODE

Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) artinya metode yang digunakan dalam penelitian adalah studi pustaka. Ciri khusus yang digunakan sebagai dasar untuk mengembangkan pengetahuan penelitian antara lain, penelitian ini dihadapkan langsung dengan data atau teks yang disajikan, bukan dengan data lapangan atau melalui saksi mata berupa kejadian, peneliti hanya berhadapan langsung dengan sumber yang sudah ada di perpustakaan atau data bersifat siap pakai, serta data-data sekunder yang digunakan (Snyder, 2019).

Pengumpulan data sekunder, atau pengumpulan informasi secara tidak langsung melalui pemeriksaan terhadap hal yang diteliti, merupakan metode yang digunakan dalam penelitian ini. Setelah mengumpulkan beberapa jurnal yang terkait dengan sistem pendidikan dinegara-negara Eropa (Inggris, Prancis, Jerman, dan Belanda), selanjutnya penulis menganalisis data dengan menggunakan analisis kualitatif deskriptif melalui *library research*, hasil dari analisis berupa data deskriptif berupa kalimat tertulis dan hasil perilaku yang diamati dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem Pendidikan di Inggris

Inggris adalah negara bagian terbesar dan terpadat penduduknya dari negara-negara bagian lain yang membentuk menjadi satu dalam persatuan kerajaan Britania Raya. Pada abad ke-7 masehi, agama Kristen cukup kuat dan berpengaruh dalam kehidupan masyarakat Inggris, sehingga disepakati adanya pengangkatan seorang uskup agung gereja katolik Roma cabang Inggris. Pada perjalanan abad berikutnya kawasan Anglo-Saxon tersebut diinvasi oleh bangsa Norman pada tahun 1066 yang memaksakan penerapan sistem foedalisme kontinental pada masyarakat Anglo-Saxon tersebut. Proses penjajahan bangsa Norman atas bangsa Anglo-Saxon itu berdampak pada terjadinya proses penularan adat-istiadat secara besar-besaran dari bangsa Norman kepada bangsa Anglo-Saxon (Rohman,2013:162-163). Inggris kuno dengan raja pertama dari keturunan Wangsa Tudor bernama Henry VII. Pemerintah Inggris pertama kali ikut mengelola bidang pendidikan baru terjadi pada tahun 1833. Permulaan mengelola bidang pendidikan tersebut dilakukan pemerintah dengan memberikan sejumlah kecil dana bantuan pada dua perkumpulan sekolah amal. Pada tahun 1870 parlemen meletakkan dasar sistem persekolahan negeri dengan mengesahkan Foster Bill, yaitu rancangan undang-undang pendidikan yang diajukan oleh William Edward Forster. Rancangan Undang-undang tersebut disahkan menjadi Undang-undang dengan isi penetapan sistem pendidikan nasional di Inggris.

Secara umum penyelenggaraan sekolah di Inggris dimulai dengan adanya tahun ajaran baru. Tahun ajaran baru dimulai setiap tanggal 1 september, kecuali kalau tanggal tersebut adalah hari libur maka dipindah ke tanggal 2 atau 3. Terdapat dua jenjang pendidikan yang diatur di dalam kurikulum nasional untuk England yaitu: pra-primer, pendidikan primer, dan pendidikan sekunder. *Education Act 2002 chapter 32* adalah Undang-undang yang mendasari pengaturan ini. Tidak terdapat kurikulum yang baku untuk pendidikan lanjutan dan pendidikan tinggi. Dikarenakan beragamnya kualifikasi yang ada di jenjang pendidikan pasca 16 tahun setiap kualifikasi memiliki kurikulumnya masing-masing. Siswa pada tahap ini dianggap cukup dewasa untuk memilih. Beberapa kualifikasi yang ada menawarkan pelatihan keterampilan praktis sehingga dapat langsung bekerja selepas itu. Beberapa menawarkan persiapan sebelum masuk ke universitas dan sebagainya (Soelaiman,2014:19). Adapun struktur dasar sistem pendidikan di Inggris seperti: (1) Pendidikan pra-primer usia 3-4 tahun; (2) Pendidikan primer usia 4-11 tahun; (3) Pendidikan sekunder usia 11-16 tahun; (4) Pendidikan lanjutan usia 16-18 tahun; dan (5) Pendidikan tinggi usia di atas 18 tahun.

Sebelum sekolah dasar, terdapat suatu kelas persiapan yang disebut *reception class* (TK) bagi anak yang berumur 4 tahun. Kemudian, ketika berumur 5 tahun dia mulai masuk ke sekolah dasar (*primary school*) sampai kelas akhir tahun ke-6 untuk anak berumur 7-10 tahun. Memasukkan anak ke sekolah negeri di Inggris berarti bebas SPP. Tak sekedar SPP, bahkan orang tua yang sungguh-sungguh tak mampu seperti mereka yang tinggal di kantung-kantung pemukiman paling kumuh sebagaimana kota Leeds berhak mendapatkan aneka *training* gratis yang disediakan oleh sekolah.

Pendidikan wajib di Inggris dimulai dari usia 5 tahun dengan mengikuti pendidikan di sekolah dasar. Siswa naik dari kelas 1 sampai kelas 6 tanpa ujian, meskipun kemampuan mereka diuji di usia 7 tahun. Penekanan ada pada mata pelajaran praktikal dibandingkan menghafal. Siswa belajar mata pelajaran inti seperti bahasa Inggris, matematika, dan sains, juga pelajaran dasar seperti sejarah, geografi, musik, dan olahraga. Sekolah lanjutan atau sekolah menengah (*secondary school*) ada dua macam. Pertama adalah sekolah lanjutan yang ditempuh oleh siswa yang berusia 11 - 15 tahun selama 5 tahun, setiap tahunnya disebut '*form*'. Di setiap '*form*' tadi, siswa memperdalam pengetahuan mereka pada mata pelajaran inti dan ditambah setidaknya 1 bahasa

asing. Kedua adalah sekolah yang ditempuh siswa setelah menyelesaikan ujian akhir *form* ke 5 yaitu setelah lulus ujian *General Certificate of secondary education* (GSCCE) kemudian melanjutkan selama 2 tahun. Dari segi kurikulum, sekolah-sekolah di Inggris menggunakan kurikulum nasional. Kurikulum nasional ditentukan oleh dewan pengembangan kurikulum sekolah khususnya untuk sekolah pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Semula dewan pengembangan kurikulum masih menjadi satu dengan dewan ujian nasional, yakni dalam satu wadah yang bernama *The School Council For Curriculum and Examinations*.

Tahun ajaran perguruan tinggi di Inggris dibagi dalam dua atau tiga term. Mahasiswa mengambil jurusan yang sesuai dengan minat yang ingin dipelajari dan dikembangkannya. Gelar sarjana akan diberikan jika mereka telah menyelesaikannya. Ada dua kelompok besar jurusan yaitu jurusan “*art*” dan “*science*”. Program pasca sarjana dapat diikuti oleh mereka yang telah lulus sarjana. Umumnya mereka sudah berumur di atas 21 tahun. Program pasca sarjana ditempuh dalam waktu 2 tahun. Mahasiswa harus menyelesaikan tugas mata kuliah, menulis tesis, dan mengikuti ujian akhir. Gelar pasca sarjana tradisional biasanya di bidang “*arts*” dengan sebutan (MA), sedang di bidang “*Science*” dengan sebutan (MSc). Gelar pasca sarjana yang makin populer adalah *Master of Business Administration* (MBA).

Untuk anak-anak luar biasa fisik dan mental diadakan sekolah-sekolah khusus sesuai dengan sistem “*tripartit*”. Anak-anak wajib belajar sampai umur 16 tahun. Sebagian dari sekolah ini mempunyai asrama untuk menampung anak-anak yang berasal dari wilayah lain. Anak-anak dengan IQ yang sedikit saja kurang dari anak normal biasanya dicampur saja dengan anak-anak yang seumur di sekolah biasa. Beberapa lembaga pendidikan untuk anak luar biasa ini menyediakan tempat untuk latihan lanjutan dan mencarikan lapangan kerja bagi mereka.

Sistem Pendidikan di Prancis

Dari sisi historis, Perancis merupakan unit politik yang dipersatukan oleh penjajahan Romawi Kuno, yang terdiri dari wilayah bangsa Gallia yang ditaklukan oleh kekuatan militer Julius Caesar, sehingga sejak saat itulah Prancis memiliki keterkaitan dengan Romawi melalui bahasa, agama dan juga politik. Pada abad 15 ketika Capet masih berkuasa dan memerintah Prancis, doktrin kekuasaan ketuhanan raja diperkokoh. Dalam doktrin tersebut seseorang menjadi raja adalah titah dari Tuhan yang tidak bisa diganggu gugat.

Prancis modern adalah Prancis yang dimulai dari pendirian republik ketiga. Kemajuan yang dicapai oleh penguasa republik ketiga dengan berbagai ide-ide pemikiran sosial, politik, ekonomi, termasuk pendidikan yang digagas oleh kaum menengah ini menjadikan bangsa Prancis berubah menjadi sosok bangsa yang maju dan disegani di kancah Eropa. Pada abad ke-18 sampai 19, Prancis membangun salah satu kekaisaran kolonial terbesar pada waktu itu, yang membentang luas melintasi wilayah Afrika Barat dan Asia Tenggara, sekaligus mempengaruhi budaya dan politik wilayah. Kemajuan kehidupan bidang sosial ekonomi dan politik berjalan seiring dengan pembangunan pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat Prancis. Pembangunan sistem pendidikan dilakukan secara masif di Prancis dimulai sejak akhir abad ke-19.

Secara umum pendidikan di Prancis desa ini berlangsung secara sentralistik. Kementerian pendidikannya adalah *Ministry of National Education* yang dipimpin oleh seorang menteri dengan dibantu oleh seorang deputi. Sentralisasi penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah tersebut selanjutnya membagi jenjang pendidikan menjadi tiga jenjang, yaitu : (1) Pada jenjang pendidikan dasar, semua anak di Prancis dikenakan wajib belajar

sampai dengan umur 16 tahun. Sebagaimana berlaku di negara-negara lain, sekolah di Prancis dimulai dari tingkat TK sebagai tingkat pra-sekolah. Pendidikan pra-sekolah dibagi menjadi 3 tingkat, yaitu: kecil, sedang, dan besar. Pada tahap ini anak-anak diperkenalkan praktek cara hidup secara berkelompok, penekanan keterampilan sederhana, dan pengenalan huruf dan angka.

Pendidikan dasar dimulai pada usia 6 tahun dan berlangsung selama 5 tahun, yaitu: kelas persiapan (CPI), kelas dasar-1 (CE-1), dasar-2 (CE-2), menengah (CM-1) dan menengah-2 (CM-2). Tujuan utama pendidikan dasar ini adalah untuk mengajarkan pada anak-anak kehidupan bermasyarakat, memberikan kemampuan membaca dan berhitung dengan persiapan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan menengah.

Kurikulum pendidikan dasar terdiri atas: bahasa Prancis, membaca dan menulis, berhitung, sejarah dan ilmu bumi, pelajaran budi pekerti dan kewarganegaraan, dasar-dasar ilmu pasti dan alam, dasar-dasar menggambar, pekerjaan tangan, bernyanyi dan gerak badan. Pelajaran di tingkat ini sama bagi semua anak, baik laki-laki maupun perempuan. Namun sebelum memasuki sekolah rendah itu, anak-anak memasuki pendidikan pra-sekolah, yang disebut "*Ecole Maternelle*", mulai umur 2 tahun.

Pada tahun terakhir anak-anak pra-sekolah mulai diperkenalkan dengan pelajaran membaca, menulis dan berhitung. Pendidikan rendah dibagi atas 3 bagian : (1) Persiapan, bagi anak yang berumur 6 sampai 7 tahun; (2) Elementer, bagi anak yang berumur 7 sampai 9 tahun; (3) Pertengahan, bagi anak yang berumur 9 sampai 11 tahun. (Asmara & Junaedi, 2017)

Setelah menyelesaikan pendidikan di sekolah dasar, mereka melanjutkan pendidikannya di pendidikan menengah tingkat pertama. Pada pendidikan menengah tingkat pertama, anak-anak belajar selama 4 tahun dan pada akhir tingkat, mereka diberi kesempatan memilih salah satu jurusan ke sekolah lanjutan atas, yaitu ke pendidikan jangka panjang atau pendek. Pada sekolah menengah pertama umum atau kejuruan (tertentu) di sekolah negeri tidak dipungut biaya, dan sampai tingkat SLP ini pun buku-buku pelajaran diberikan secara gratis.

Pendidikan menengah atas tersedia secara tradisional di sekolah negeri yang disebut *Lycee* dan sekolah kota Praja yang disebut *Colleges*. Menurut sejarahnya, *Lycee* lebih selektif sehingga memiliki reputasi lebih baik dan sempurna. Sedangkan, *College* cenderung mengakomodasi cita rasa pendidikan modern dan lebih cepat beradaptasi dengan permintaan umum warga kota Praja yang mendukungnya. Namun demikian, keduanya baik *Lycee* maupun *College* sama-sama mempersiapkan siswa untuk mengikuti ujian *Baccalaureate Collage* setara dengan sekolah menengah pertama di Indonesia, sedangkan *Lycee* setara dengan Sekolah menengah atas di Indonesia.

Sistem Pendidikan Di Jerman

Pada awalnya, pendidikan di Jerman selalu dipengaruhi oleh dua lembaga besar, yaitu pemerintahan dan lembaga keagamaan (Gereja). Selain itu, negara bagian juga ikut mengatur sistem pendidikan pada abad ke-17, masalah pendidikan lambat laun mulai beralih menjadi kewajiban negara. Undang-undang dasar menjamin hak setiap orang untuk mengembangkan kepribadiannya dan memilih sekolah, pendidikan kejuruan dan pekerjaan sesuai dengan keinginan dan kemampuannya. Berdasarkan tata negara Federal Jerman, kewenangan pendidikan dibagi menjadi federasi dan negara bagian. Negara bagian terutama bertanggung jawab untuk sekolah umum dan sekolah kejuruan serta taman kanak-kanak.

Pada tahun 1716 Jerman mengikuti jejak negara-negara lain di kawasan Eropa, yaitu melaksanakan program wajib sekolah. Pada tahun 1763, kaisar Frederick Agung berupaya meningkatkan mutu pengajaran sekolah yang berbahasa daerah dengan cara memperbaiki jenis mata pelajaran yang diajarkan dan penggunaan metode baru dalam pengajaran. Pada tahun 1787 pemerintah mulai khawatir karena Gereja tidak lagi giat dalam urusan pendidikan. Pemerintah kemudian mendirikan sebuah badan khusus dalam pemerintah sipil yang mengurus pendidikan yaitu komisi tinggi untuk sekolah. Kebijakan pemerintah tersebut ditujukan untuk menempatkan sekolah-sekolah dibawah pengawasan sipil. Kemudian dengan naik tahtanya Frederick William II menjadi kaisar, pengawasan sekolah dikendalikan lagi oleh Gereja. Kaisar baru ini mengangkat para pendeta tinggi masuk dikomisi tinggi untuk sekolah yang tugasnya mengurus sekolah.

Disamping sekolah dasar dikendalikan oleh Gereja, sekolah menengah juga memiliki hubungan erat dengan Gereja dan mewajibkan kepada siswanya mengikuti pelajaran agama, termasuk universitas juga melayani tujuan Gereja. Salah satu bentuk pelayanan universitas kepada Gereja adalah berupa menghasilkan lulusannya yang siap menjadi calon pejabat tetap di Gereja dan mengabdikan untuk kemajuan Gereja. Pendidikan di Jerman dimulai dari tahap prasekolah disebut *Kindergarten* (TK) dimulai dari umur 3-6 tahun. Konsep taman kanak-kanak di Jerman banyak ditiru oleh negara lain. Oleh sebab itulah, tingkatan sekolah ini di beberapa negara tetap mengadopsi nama Jermannya '*Kindergarten*'. Penyelenggara taman kanak-kanak paling banyak adalah Gereja-gereja, organisasi sosial dan komunitas, kadang-kadang juga perusahaan dan perkumpulan.

Setelah *Kindergarten* dimulai, pendidikan dasar pada usia 7 sampai dengan 10 tahun. Mereka mempunyai 4 pilihan untuk melanjutkan sekolah. Pilihan tersebut: 1. *Hauptchule* (kelas 5-9/10), 2. *Realschule* (kelas 5-10), 3. *Gesamtschule* (kelas 5-13), 4. *Gymnasium* (kelas 5-13).

Secara umum, sekolah-sekolah di Jerman hanya menyelenggarakan pendidikan hari perminggu. Hari senin sampai jum'at para siswa untuk masuk sekolah, sedangkan hari sabtu dan minggu mereka belajar dirumah bersama orang tua atau teman sebaya dalam rangka mengerjakan tugas-tugas sekolah dan belajar pendalaman. Khusus sekolah-sekolah lanjutan mengajarkan banyak mata pelajaran. Mata pelajaran yang diajarkan di sekolah lanjutan adalah mata pelajaran budaya (mencakup, seni, etika, musik, bahasa nasional dan bahasa asing), ilmu alam (astronomi, kimia, fisika, dan biologi), ilmu sosial (sejarah, ekonomi, geografi), matematika, pendidikan jasmani, dan juga agama.

Model perkuliahan tersusun dari *Vorlesung* (perkuliahan), seminar, dan *Ubung* (latihan). Ujian dilakukan langsung dengan profesor yang bersangkutan. Rata-rata ujian bersifat lisan, walau ada juga yang diberikan secara tulisan. Sistem ujiannya juga bervariasi ada yang diperbolehkan mengulang (untuk mata kuliah yang tidak lulus), namun sering juga diperbolehkan hanya sekali saja (Saifullah, 2015:29-30).

Program wajib belajar di Jerman hanya 13 tahun, dilaksanakan dengan pendekatan yang sangat terstruktur dengan perencanaan yang matang, bahkan dengan sanksi yang sangat keras bagi orangtua/wali. Metode pembelajaran di Jerman, sejak dari taman kanak-kanak sudah didesain sedemikian rupa, dengan perencanaan yang matang. Pada jenjang dasar siswa hanya fokus pada bermain. Pada jenjang ini mereka belum diajarkan mata pelajaran apapun, mereka hanya dituntut untuk berlaku sopan santun.

Ujian Negara (UN) juga diterapkan di Jerman dan yang diujikan hanya fokus pada empat mata pelajaran: bahasa Jerman, Matematika, Fisika, dan dua mata pelajaran bahasa yang bisa dipilih, bahasa Spanyol dan bahasa Prancis (Ariyayah dan Musfah, 2016: 47-48).

Jerman dalam perkembangannya termasuk negara yang telah menerima dengan terbuka untuk memperbolehkan pelajaran agama Islam bagi pelajar muslim di sekolah-sekolah umum. Sebelumnya, Masjid-masjid dijadikan pusat pendidikan non formal atau pada kelompok-kelompok masyarakat, sebagai sarana muslim Jerman menerima pelajaran agama. Selain itu pula, pelajaran agama saat ini, tidak hanya terbatas pada level sekolah, tetapi juga telah diperkenalkan pada tingkat akademik dengan hadirnya jurusan Teologi Islam di perguruan tinggi. Dan di beberapa Universitas di Jerman telah membuka pendidikan guru pelajaran agama Islam, seperti yang terdapat di Universitas Munster, telah membuka jurusan pedagogi Islam. Pemerintah di Jerman sangat memperhatikan kualifikasi guru (Tobroni,2018:145).

Sistem Pendidikan di Belanda

Letak negara ini sekitar muara sungai Rhein, sejak dahulu merupakan saluran lalu lintas air ke daerah hulu itu sebabnya rakyat Nederland banyak mendapat pengaruh dalam berbagai bidang kehidupan antara lain bidang politik dan pendidikan. Pembukaan sekolah dasar didorong oleh Gereja. Memang Gereja mengakui wewenang pemerintah dalam bidang pendidikan, tetapi sebaliknya Gereja mendapat hak untuk menentukan bahan pelajaran agama dan mengawasi kecakapan dan kepercayaan guru-guru.

Raja William II berusaha menghilangkan hambatan-hambatan pelaksanaan Undang-undang dengan membentuk suatu komisi yang menyampaikan usul-usul perbaikan sebagai hasil komisi, dikeluarkanlah keputusan Raja tahun 1842 yang tidak memenuhi harapan golongan-golongan yang tidak puas. Sebab komisi ini telah mengusulkan untuk meneruskan permohonan pengesahan sekolah itu kepada raja. Perjuangan sekolah swasta selama 80 tahun terlalu banyak memusatkan perhatian pemerintah pada soal-soal agama. Semenjak tahun 1903 terbentuk satu organisasi pemerintah berbentuk satu komisi untuk menyusun 1 organisasi pendidikan yang integral. Sesudah itu, disusun pula satu rencana yang mengatur dasar-dasar pendidikan tetapi rencana itu tidak diteruskan ke parlemen untuk disahkan menjadi Undang-undang. Kemudian disusun pula dua nota pendidikan yang mengatur organisasi pendidikan baru.

Kewajiban belajar di Belanda ditetapkan dalam Undang-undang kewajiban belajar. Tahun 1900 kewajiban belajar itu 6 tahun lamanya, tetapi pada tahun 1928 jangka wajib belajar itu menjadi 7 tahun. Semenjak tahun 1950 lamanya wajib belajar itu ditingkatkan menjadi 8 tahun dan sejak tahun 1969 dijadikan 9 tahun yaitu sampai pada tingkat sekolah menengah. Sekolah dasar sebagai pengganti nama sekolah rendah diatur dalam Undang-undang sekolah rendah tahun 1920 sekolah ini 6 tahun lamanya. Perubahan nama jenis sekolah ini menunjukkan perubahan fungsi dengan nama baru itu fungsi SD dianggap memberikan pengetahuan dan kecakapan yang lengkap untuk penghidupan berikutnya.

Anak-anak yang dijadikan pusat perhatian bukan lagi bahan pelajaran. Bahan pelajaran tidak lagi ditetapkan untuk 1 tahun pelajaran tertentu. Menurut pengaturan ini, tidak ada lagi anak-anak yang tinggal kelas walaupun begitu masih ada sekolah yang menerapkan sistem kenaikan kelas dan tidak naik kelas pelajaran diberikan di sekitar 4 objek, yaitu: (1) Kecakapan instrumental dan kebudayaan yang mengutamakan pelajaran bahasa termasuk bahasa Inggris, menulis, dan berhitung; (2) Pengenalan dunia sejarah geografi, biologi, fisika, dan lalu lintas; (3) Saluran-saluran berekspresi kerajinan tangan, musik, dan menggambar; dan (4) Olahraga.

Sebagai pengganti kelas, dibentuk kelompok-kelompok murid di bawah pimpinan guru kelompok. Untuk anak-anak yang mempunyai cacat tubuh atau cacat jiwa diadakan sekolah luar

biasa pendidikan. Untuk anak-anak yang mengikuti orang tuanya di kapal sungai atau kereta tempat tinggal keliling diberikan secara khusus.

Sekolah Menengah itu dibagi dalam tiga golongan: (1) Pendidikan persiapan untuk tingkat ilmiah yang mempersiapkan lulusannya untuk perguruan tinggi; (2) Sekolah menengah umum yang mempersiapkan lulusannya untuk sekolah kejuruan memberikan pendidikan umum; (3) Sekolah kejuruan, seperti teknik pertanian dan perkebunan, perkapalan, perdagangan, kerumahtanggaan, pendidikan dan lain-lain. Tingkatannya beragam pula yaitu rendah menengah dan atas namanya pun bermacam-macam ada yang 2 tahun sampai yang 5 atau 6 tahun. Sekolah pendidikan guru kecuali untuk guru taman kanak-kanak masuk sekolah kejuruan tingkat atas pada semua kejuruan ini diberikan pendidikan umum terlebih dahulu selama beberapa tahun.

D. KESIMPULAN

Struktur dasar sistem pendidikan di Inggris, yaitu: pendidikan pra-primer usia 3-4 tahun, pendidikan primer usia 4-11 tahun, pendidikan sekunder usia 11-16 tahun, pendidikan lanjutan usia 16-18 tahun, dan pendidikan tinggi usia di atas 18 tahun. Di Prancis, Secara umum pendidikan berlangsung secara sentralistik. Penyelenggaraan pendidikan terdiri dari jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Semua anak di Prancis dikenakan wajib belajar sampai dengan umur 16 tahun. Sekolah di Prancis dimulai dari tingkat TK sebagai tingkat pra-sekolah. Anak yang sudah berumur 2 tahun sudah boleh masuk TK, walaupun pada umumnya anak-anak masuk TK berumur 3-4 tahun. Pendidikan di Jerman dipengaruhi oleh dua lembaga besar, yaitu pemerintahan dan lembaga keagamaan (Gereja). Pendidikan di Jerman dimulai dari tahap prasekolah disebut *Kindergarten* (TK) dimulai dari umur 3-6 tahun. Pendidikan dasar pada usia 7-10 tahun. Di Jerman wajib belajar 13 tahun. Program wajib belajar di Jerman, di laksanakan dengan sangat terstruktur dan perencanaan yang matang. Sedangkan di Belanda, kewajiban belajar ditetapkan dalam Undang-undang kewajiban belajar. Tahun 1900 kewajiban belajar itu 6 tahun lamanya, tetapi pada tahun 1928 jangka wajib belajar itu menjadi 7 tahun. Semenjak tahun 1950 lamanya wajib belajar itu ditingkatkan menjadi 8 tahun dan sejak tahun 1969 dijadikan 9 tahun yaitu sampai pada tingkat sekolah menengah.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Araiyyah, M Hamdar,dkk. 2016. Pendidikan Islam: Memajukan Umat dan Memperkuat Kesadaran Bela Negara. Jakarta: Kencana
- Asmara, Andes Safarandesa, dkk. 2017. *Jurnal: Trend Kurikulum dalam Pendekatan Matematika*, Vol. 2, No 1
- Rohman, Arif, 2013. *Pendidikan Komparatif*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo
- Saifullah. 2015. *Jurnal Pendidikan Islam, Konsep Pendidikan Jerman dan Australia: Kajian Komparatif dan Aplikatif terhadap Mutu Pendidikan*, Vol IV, No 1
- Soelaiman, T.A Fauzi. 2014. *Sistem Pendidikan di Inggris, Kantor Atase Pendidikan, Kedaulatan Besar Republik Indonesia (KBRI)*. London
- Tobroni. 2018. *Memperbincangkan Pemikiran Pendidikan Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group